

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, M., et al. (2019). Buku laporan kinerja tahunan 2019.
- Bowler, S., et al. (2015). Election administration and perceptions of fair elections. *Electoral Studies*, 38, 1–9.  
<https://doi.org/10.1016/J.ELECTSTUD.2015.01.004>
- CNN Indonesia. (2022). Partai Ummat Tidak Lolos Verifikasi Faktual di Dua Provinsi, Ini Penjelasan KPU. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221214085700-32-888888/partai-ummat-tidak-lolos-verifikasi>
- CNN Indonesia. (2022). Rekaman Dugaan Kecurangan Verifikasi Partai Politik untuk Pemilu 2024 Beredar. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com>
- Ellul, J. (1965). *Propaganda: The Formation of Men's Attitudes*. New York: Knopf.
- Febriadi, H. (2018). Implementasi UU No 7 tahun 2017 terhadap kedudukan dan kinerja panitia pengawas pemilu kabupaten Hulu Sungai Utara. *Al-Adl*, 10(1), 43. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i1.1152>
- Febriansyah, M., et al. (2020). Competing not complementing: KPU, Bawaslu, and the dynamic of election monitoring in PEMILU 2019. *Asian Journal of Political Science*, 275–293.  
<https://doi.org/10.1080/02185377.2020.1781670>
- Gísladóttir, I. S., & Office for Democratic Institutions and Human Rights. (2019). *Handbook for the observation of election dispute resolution*.
- Gloppen, S., et al. (2006). *Uganda's 2006 Presidential and Parliamentary Elections*.
- Hartono, R., & Pratiwi, I. (2022). *Strategi Politik Partai Gelora dalam Mencapai Parliamentary Threshold pada Pemilu 2024*. Jakarta: Universitas Indonesia.

- International IDEA. (2010). *Electoral justice: The International IDEA handbook*. International IDEA.
- Joseph, O., & McLoughlin, F. (2019). Electoral justice system assessment guide. In *Electoral Justice System Assessment Guide*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance. <https://doi.org/10.31752/idea.2019.21>
- Kaban, A. R. R., et al. (2018). Kekuatan Mengikat Putusan Ajudikasi Bawaslu Dalam Sengketa Proses Pemilu 2019. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(2), 400–424. <https://doi.org/10.24912/ADIGAMA.V1I2.2839>
- Kompas.com. (2022). Lagi, KPU nyatakan 5 partai pemenang sengketa di Bawaslu tak lolos verifikasi administrasi.
- KumparanNews. (2021). Perludem soal putusan MK: Harusnya semua parpol diverifikasi faktual.
- Kpu.go.id. (2022). *Kilas pemilu 2024*.
- Liputan6. (2022). Partai Ummat Laporkan ke Bawaslu Terkait Dugaan Kecurangan Verifikasi Faktual. Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/888888/partai-ummat-lapor-bawaslu-verifikasi-kpu>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). *Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2017 tentang Pemilu Serentak*. Diakses dari [https://www.mkri.id/putusan/putusan\\_mk55\\_2017](https://www.mkri.id/putusan/putusan_mk55_2017)
- Mustafa, M., & Maharani, R. (2023). *Evaluasi Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024*. Resolusi: Jurnal Sosial Politik, 6(1), 1-56. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v6i1.4327>
- Nkansah, L. A. (2016). Dispute resolution and electoral justice in Africa: The way forward. *41*(2), 97–131. <https://doi.org/10.2307/90013871>
- Peraturan KPU No 4 tahun 2022. (2022).

- Perludem. (2021). 9 parpol tak ikut verifikasi faktual pemilu 2024, Perludem sebut 4 potensi problematika hukumnya.
- Rahayu, M. M., et al. (2020). Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. *Diponegoro Law Journal*, 9(2), 373–383. <https://doi.org/10.14710/DLJ.2020.27027>
- Risalah Sidang 11186\_Perkara Nomor 55.PUU-XVIII.2020 7 Desember 2020. (2020).
- Santoso, T., et al. (2006). *Penegakan hukum pemilu*. Perludem.
- Santoso, T., et al. (2011). *Membangun demokrasi dengan menegakkan keadilan pemilu*. Perludem.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (1). Diakses dari <https://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-1/>
- Setkab.go.id. (2023). Hasil pemantauan pelaksanaan tahapan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024. Diakses dari <https://setkab.go.id/hasil-pemantauan-pelaksanaan-tahapan-pemilihan-umum-pemilu-tahun-2024/>
- Siregar, A. A., & Rosalia, F. (2018). Kewenangan ajudikasi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan implementasinya di daerah. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 2(2), 1–13. <https://doi.org/10.23960/JASP.V2I2.26>
- Sultan, W. F., et al. (2022). Perbandingan verifikasi peserta pemilu tahun 2019 dan 2024. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 7(2), 151–166. <https://doi.org/10.24256/pal.v7i2.3080>
- Syafriandre, A., et al. (2019). Malpraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019. *Jurnal Wacana Politik*, 4(1).

- Ulya, N. (2023). Putusan mediasi sengketa tata usaha negara, pemilu di Kota Bekasi pada pemilu 2019 dalam perspektif teori keadilan John Rawls. Diakses dari <https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index>
- Wuriahandayani, S. E. (2021). Dinamika politik lokal dalam pemilihan kepala desa di desa Tenggur.
- Yulianto. (2021). Problematika dan tantangan penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan tahun 2024. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2(2), 75–89. <https://doi.org/10.55108/JKP.V2I2.139>
- Yusri, D. A. A. (2024). Strategi Politik Partai Ummat Menjelang Pemilu 2024 (Studi Kasus Verifikasi Faktual Partai Ummat). Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Diakses dari [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)